

Hingga Maret 2024, Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Capai 18,26 Persen dari Target



Sumber gambar:

<https://diskominfo.kalselprov.go.id/2024/04/30/hingga-maret-2024-kinerja-apbn-capai-1826-persen-dari-target/>

Kinerja APBN sampai dengan Maret 2024, khususnya disisi pendapatan telah terealisasi sebesar Rp4,22 triliun atau 18,26 persen dari target. Jika dibandingkan pada periode yang sama 2023, pertumbuhannya -23,02 persen.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel Syafriadi menyebutkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan angka pertumbuhan yang positif yaitu 9,33 persen dengan realisasi sebesar Rp531,37 Miliar. Realisasi total belanja negara sebesar Rp8,26 triliun atau 21,80 persen dari pagu. Capaian ini meningkat 25,30 persen dibandingkan tahun lalu. Realisasi Belanja untuk periode Triwulan I 2024 ini didominasi oleh realisasi Belanja Pegawai dalam rangka pembayaran THR pegawai dalam rangka Hari Raya Idul Fitri.

“Penjelasan lebih rinci untuk pendapatan negara, realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai Rp3,64 Triliun atau 16,98 persen dari target, terkontraksi sebesar -23,90 persen (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp2,25 Triliun, kemudian PPN memberikan kontribusi sebesar Rp1,19 Triliun,” kata Syafriadi, Banjarmasin, Selasa (30/4/2024).

Dijelaskan Syafriadi, tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 35,3 persen, kemudian sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 18,9 persen, dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 11,4 persen. Secara kumulatif, sampai dengan Bulan Maret 2024, mayoritas sektor utama masih tumbuh positif, kecuali

Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Perdagangan Besar, dan Sektor Pertanian, yang mengalami kontraksi.

“Kinerja penerimaan negara yang dipungut oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan Maret 2024 sebesar Rp2,27 Triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp46,81 Miliar dan penerimaan lainnya Rp2,22 Triliun. Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan yang dipungut oleh Kanwil DJBC Kalbagsel adalah penurunan harga ekspor komoditas batubara, CPO dan turunannya,” ucapnya.

Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp531,37 Miliar atau 42,81 persen dari target, tumbuh 9,33 persen (yoy). Capaian ini berasal dari PNBP BLU (24,77 persen) dan PNBP Lainnya (75,23 persen). PNBP Lainnya antara lain berasal dari PNBP yang dipungut DJKN yaitu PNBP aset, piutang negara, dan bea lelang.

Disisi lain realisasi belanja negara sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp8,26 Triliun, atau sebesar 21,80 persen dari pagu yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp2,09 Triliun (23,78 persen dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah/TKD sebesar Rp6,17 Triliun (21,20 persen dari pagu).

“Khusus untuk belanja pegawai, realisasinya meningkat karena dipengaruhi oleh pembayaran THR pegawai dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Untuk belanja modal, pemerintah terus mendorong akselerasi belanja modal di awal tahun 2024. Realisasi belanja modal sampai dengan Maret 2024 baru mencapai Rp103,12 Miliar (8,73 persen dari pagu),” ungkapnya.

Rendahnya serapan belanja modal karena sebagian besar belanja modal khususnya untuk pekerjaan konstruksi baru tahap lelang dan baru selesai di periode Semester II 2024. Untuk kinerja belanja, terdapat 10 K/L dengan presentase realisasi terbesar di Kalimantan Selatan adalah KPU, Bawaslu, Bappenas, Kementerian Pertahanan, Mahkamah Agung, BKKBN, BPKP, Kepolisian, BPK, dan Kementerian Agama.

Sumber berita:

1. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/04/30/hingga-maret-2024-kinerja-apbn-capai-1826-persen-dari-target/>, 30 April 2024.
2. <https://www.infobanjarmasin.com/hingga-maret-2024-kinerja-apbn-capai-1826-persen-dari-target/>, 1 Mei 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- ⊕ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- ⊕ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
- ⊕ Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- ⊕ Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Struktur APBD

